

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI-BULLYING DI SDN RONGKOP GIRISUBO

Reli Relaksa¹, Hadid Hidayatullah², Tri Sugiyanti³

¹Administrasi Publik, Universitas Gunung Kidul

²Administrasi Publik, Universitas Gunung Kidul

³Administrasi Publik, Universitas Gunung Kidul

Email: relirlksa@gmail.com, hadidhidayatullah16@gmail.com, trisugianti814@gmail.com

Abstract

This research aims to find out how the implementation of anti-bullying policy at SDN Rongkop Girisubo. The phenomenon of bullying that is rampant in the school environment has a long-term negative impact on student development. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The data collection techniques used were observation, interview, and documentation. Data were collected through interviews with principals, teachers and students. The results showed that the anti-bullying policy has been implemented at SDN Rongkop, by forming a Violence Prevention and Handling Team (TPPK), training for teachers, and socialization to students. However, limited resources and budget are still an obstacle in the optimal implementation of the program. The school needs to increase the budget allocation to support further bullying prevention programs.

Keywords: Policy Implementation, Anti-Bullying, Elementary School

PENDAHULUAN

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan merupakan proses belajar mengajar yang dapat menghasilkan perubahan perilaku sesuai yang diinginkan, karena tidak semua perilaku berasal dari sifat bawaan seseorang. Beberapa perilaku bisa didapat melalui berbagai pengalaman. Ada tiga peran utama yang memengaruhi perilaku dan kepribadian anak dalam lingkungan pendidikan, yang biasa disebut sebagai “Sistem Pendidikan Tiga Tahap”, sistem ini terdiri dari : 1) pendidikan di dalam keluarga, 2) pendidikan di sekolah, 3) pendidikan di masyarakat. Melalui tahapan pendidikan yang tersedia di lingkungannya, para siswa dipersiapkan sejak dini untuk mengembangkan kepribadian yang positif baik kreatif dan inovatif, mereka dididik untuk tidak hanya menjadi anggota yang cerdas dan baik di sekolah, tetapi juga menjadi teladan di masyarakat (Nurhidayat et al., 2020).

Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 (3) menyebutkan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang (Dr. H. M. Asrorun Ni’am Sholeh, 2016). Usia dini adalah usia kritis bagi pembentukan karakter seorang anak.

Copyright ©Reli Relaksa, Hadid Hidayatullah, Tri Sugiyanti. 2024

Corresponding author :

Email : relirlksa@gmail.com, hadidhidayatullah16@gmail.com, trisugianti814@gmail.com

Penanaman moral melalui pendidikan karakter sedini mungkin kepada anak-anak adalah kunci utama untuk menyiapkan generasi yang bermoral (Muhammad Hasbi et al., 2020). Salah satu faktor penting yang mempengaruhi perilaku anak mulai dari usia dini adalah lingkungan sekolah. Oleh karena itu, sekolah memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membentuk perilaku yang positif pada siswa, yang dikemukakan oleh Ponny Retno Astuti dalam (Rena et al., 2021). Di lingkungan sekolah guru sering menyaksikan kejadian seperti seorang anak mendorong anak lain hingga terjatuh atau seorang anak merebut mainan dari temannya. Sekelompok anak mungkin menertawakan dan mengejek anak lain dengan nama-nama yang menyakitkan, kejadian-kejadian ini dapat terjadi di halaman sekolah, selama perjalanan pulang pergi, di lingkungan sekitar, atau di area bermain. Meskipun tindakan-tindakan ini mungkin tampak biasa, namun sebenarnya tindakan tersebut mencerminkan terjadinya perundungan yang biasanya dikenal dengan istilah-istilah seperti pelecehan, pemerasan, pengucilan, dan intimidasi (Rena et al., 2021).

Istilah “*Bullying*” dalam bahasa Inggris berasal dari kata “*bully*” yang berarti “menggertak”, dan pertama kali ditemukan pada tahun 1710. Rigby (2007: 15) menjelaskan bahwa: “*bullying is repeated oppression, psychological or physical, of less powerful person by a more powerful person or group of persons*”. Yang artinya “bullying adalah penindasan berulang, yang bersifat psikologis atau fisik, kepada orang yang lebih lemah dari orang atau kelompok orang yang lebih kuat” (Mahardika, 2018). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan, sekitar 3.800 kasus perundungan di Indonesia sepanjang 2023. Hampir separuh terjadi di lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren (Elaine, 2024). Nurhidayat pada tahun 2020 menyatakan bahwa perilaku menyimpang sering dilakukan oleh siswa, terutama dalam bentuk berikut: (1) siswa sering melakukan perundungan terhadap temannya di sekolah, (2) siswa sering berkata kasar kepada temannya, (3) kurangnya pengawasan dan monitoring guru dalam mencegah perundungan di kelas pembelajaran (Rena et al., 2021).

Girisubo menghadapi tantangan khusus dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan bebas dari perilaku bullying. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku siswa adalah kondisi geografis sekolah yang terletak di kompleks sekitar pasar. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Rongkop Girisubo menghadapi tantangan terkait Sumber Daya Alam (SDA) dan kondisi geografisnya. Karena lokasinya yang berada di kompleks sekitar pasar, terdapat dampak negatif terhadap perilaku siswa dalam bertutur kata, di mana mereka cenderung mengadopsi bahasa atau sikap dari berbagai sumber atau lingkungan sekitar. (Hasil wawancara dengan salah satu guru SDN Rongkop Girisubo pada tanggal 16 September 2024). Dalam konteks ini, SDN Rongkop Girisubo memberikan gambaran mengenai pengaruh lingkungan sekitar terhadap perilaku siswa.

Fenomena perundungan yang kerap terjalin pada siswa di sekolah bisa mempunyai akibat negatif yang berkelanjutan, oleh sebab itu guru selaku pemeran utama dalam pembelajaran butuh mempunyai media buat meminimalisir timbulnya fenomena tersebut. Guru sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan media pendidikan (Abdul Halim et al., 2023). Pengaruh lingkungan sekolah terhadap anak yang menjadi pelaku bullying. Kelalaian pihak sekolah yang tidak memperhatikan bullying telah menyebabkan para pelaku bullying memperkuat perilaku tersebut untuk melakukan bullying terhadap siswa lainnya. Menurut Pinky Saptandari dalam buku Bagong Suyanto, dampak yang sering dialami anak-anak korban kekerasan adalah kurangnya motivasi atau percaya diri, masalah Kesehatan mental, mimpi buruk, perasaan takut, dan sering melakukan kekerasan terhadap anak hal ini juga dapat menyebabkan kematian pada korban (Maharani et al., n.d.).

Dalam menghadapi meningkatnya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, banyak sekolah kini mengambil langkah proaktif untuk melindungi peserta didik dari situasi tersebut, terutama terkait dengan tindakan bullying, yakni dengan mengimplementasikan kebijakan anti-bullying di sekolah. Cahyani dan Widodo pada tahun 2022 mengatakan bahwa program pencegahan bullying bertujuan untuk membangun pemahaman dalam komunitas, menciptakan kesadaran diri yang positif tanpa perlu memberikan peringatan atau mengancam orang lain untuk menghentikan tindakan intimidasi (Rohimin Saman Huda Nur et al., 2024).

Penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan anti-bullying di SDN Rongkop Girisubo. Penelitian ini penting dilakukan mengingat usia sekolah dasar adalah fase kritis dalam pembentukan karakter anak. Sehingga pencegahan perilaku bullying sejak dini diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui bagaimana implementasi kebijakan anti-bullying serta upaya peningkatan yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah dan pemangku kepentingan lainnya.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses pembuatan kebijakan (policy making process). Seperti yang dinyatakan Hasbullah dalam (Yuliah, 2020) bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan proses politik yang berlangsung dalam tahap-tahap pembuatan kebijakan politik, dimana aktivitas politis ini di dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung satu sama lainnya, diatur menurut urutan waktu, seperti penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan pengertian lain dari implementasi juga disampaikan oleh Fattah dalam (Dafid Ariyanta, 2024) yang mengungkapkan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif, tanpa sumberdaya kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel (Subarsono, n.d.).

Pengertian Bullying

Bullying atau yang lebih dikenal dengan perundungan menurut KBBI berasal dari kata runding atau merunding yang berarti mengganggu; mengusik terus-menerus; menyusahkan. Lalu, diartikan juga dengan menyakiti orang lain-baik secara fisik maupun psikis, dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik berulang kali dan dari waktu ke waktu (Ratih, 2024). Bullying dipandang sebagai bentuk perilaku agresif, yaitu tindakan kejahatan atau membuat individu merasa tidak berdaya. Perilaku ini dilakukan secara terus menerus dan dengan sengaja (Wulansari et al., 2023). Secara emosional, perundungan dapat menyebabkan trauma yang mendalam bagi para korban. Siswa yang mengalami perundungan sering kali mengalami perasaan malu, takut, dan putus asa. Reaksi umum yang dapat muncul dari perundungan yakni rasa tidak percaya diri, cemas, dan depresi. Kondisi emosional ini dapat berdampak pada kesehatan mental siswa, mengurangi kepercayaan diri dan mengganggu interaksi sosial mereka. Nantinya, hal ini dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi, baik secara akademis maupun sosial (Nasution, 2024).

Dikutip dari tesis yang ditulis oleh (Dafid Ariyanta, 2024) beberapa jenis bullying yang sering ditemui, yakni:

1. Bullying dalam bentuk fisik, yakni mengacu pada bentuk-bentuk perundungan yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung. Contohnya seperti menampar, menginjak kaki seseorang, memaksa mereka melakukan push-up, berlari mengelilingi lapangan, atau melempar benda-benda ke arah mereka.
2. Bullying secara verbal, yakni perundungan yang dilakukan secara lisan (omongan) dan diterima korban melalui pendengaran. Contohnya seperti menghina, mengejek, memberikan julukan yang menghina seperti membandingkannya dengan binatang, menuduh mereka melakukan sesuatu, mencemooh atau memanggil mereka dengan nama orang tua.
3. Cyberbullying, ini merupakan perundungan yang terjadi dan disebarluaskan secara online di jejaring sosial.

Karakteristik Perilaku Bullying

1. Hanya sebagian kecil anak yang murni menjadi korban atau menjadi pelaku perundungan. Sebagian besar anak sebenarnya melakukan kedua peran tersebut: mereka merundung beberapa teman sebaya sekaligus dirundung oleh orang lain.
2. Pelaku perundungan sering menyerang orang lain berulang kali karena mereka menganggapnya sebagai ancaman. Mereka berharap dapat menghalang-halangi lawan mereka sejak awal.
3. Meskipun sulit untuk membedakan antara pelaku dan korban berdasarkan ciri-ciri tertentu, anak-anak yang terlibat dalam kedua peran tersebut dapat dengan mudah diidentifikasi dibandingkan dengan mereka yang tidak terlibat dalam perundungan (Rena et al., 2021).

Field (2007) menyatakan bahwa ada beberapa fakta tentang bullying. Berikut beberapa fakta tentang bullying: (1) bullying melibatkan pelecehan psikologis, emosional, sosial atau fisik. (2) ciri yang krusial adalah persepsi : korban merasa tidak berdaya. (3) masalah seriusnya yakni tingkat kerusakan yang terjadi pada korban. (4) sekitar 1 dari 5 siswa diganggu secara terus menerus dan sekitar 1 diantara 5 korban adalah pelaku perundungan (Karyanti & Aminudin, 2019).

Faktor-Faktor yang Berpengaruh

Faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap terjadinya perundungan meliputi:

1. Kekuasaan dan dominasi, salah satu faktor utamanya adalah dorongan untuk mendapatkan kekuasaan dan dominasi atas orang lain. Pelaku perundungan mungkin merasa lebih kuat atau lebih unggul daripada korbannya, dan menggunakan perundungan untuk menegaskan bahwa mereka berkuasa.
2. Kurang empati, pelaku perundungan sering kali tidak memiliki empati atau pemahaman tentang perasaan korbannya. Mereka mungkin tidak menyadari dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan mereka.
3. Tingkat stres dan frustrasi, pelaku perundungan mungkin mengalami stres atau frustrasi dalam kehidupan mereka sendiri dan menyalurkan perasaan ini dengan mengejek atau meremehkan orang lain.
4. Pengaruh lingkungan, lingkungan di sekitar pelaku perundungan termasuk keluarga dan teman, dapat mempengaruhi perilaku perundungan. Perilaku agresif yang dicontohkan oleh orang dewasa atau teman sebaya dapat memberikan contoh negatif. Rahmatullah dalam (Misfala et al., 2023).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sikap yang terlalu protektif dari orang tua terhadap anak-anak mereka dapat membuat anak-anak menjadi rentan terhadap perlakuan buruk oleh teman-teman sebaya, baik secara fisik maupun psikologis (Gede et al., 2024).

Pengertian Pendidikan

Pendidikan menurut Suparlan Suhartono (2008:46) yakni “seluruh kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan secara teratur dilembaga pendidikan sekolah”. Lembaga pendidikan yang dimaksud adalah sekolah. Jenjang pendidikan paling dasar di Indonesia adalah Sekolah Dasar (SD).

Menurut Suharjo dalam (Syahroni, 2024) menyatakan bahwa “sekolah dasar pada dasarnya merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun bagi anak-anak usia 6-12 tahun.” Hal ini senada dengan pendapat Fuad Ihsan (2008:26) bahwa “sekolah dasar sebagai satu kesatuan dilaksanakan dalam masa program belajar selama 6 tahun.” Mencermati kedua pernyataan Suharjo dan Fuad Ihsan dapat dijelaskan bahwa sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan yang berlangsung selama enam tahun (Alhuda,

2020). Pendidikan yang diajarkan dan dibutuhkan saat ini tidak lagi sekedar soal akademis dan kualitas intelektual, tapi juga pendidikan moral dan karakter kemanusiaan. Sistem pendidikan yang dimaksud sebenarnya telah jelas diungkap pada sistem pendidikan nasional. Hal ini bermakna bahwa pendidikan merupakan suatu proses atau upaya sadar untuk menjadikan manusia menjadi sosok yang lebih baik (Tesi Muskania, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Menurut Sugiyono (2009:15) yang dikutip dalam (Fauzan et al., 2024) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul nantinya berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka (Dr. Abdul Fattah Nasution, 2023). Penelitian ini dilaksanakan di SDNegeri Rongkop yang beralamat di Jerukwudel, Girisubo, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55883.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Sugiyono (2008) mengemukakan bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan dilakukan adalah bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang luas, rinci, dan mendalam sehingga didapat suatu kebenaran yang bermakna dan menyeluruh (Sinaga, n.d.). Peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan dan dapat memberikan informasi yang akurat, yakni Kepala sekolah, Guru, dan Siswa.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan karangan asli yang ditulis oleh seorang yang melihat, mengalami, atau mengerjakan sendiri. Bahan Literatur semacam ini dapat berupa buku harian (autobiography), tesis, disertasi, laporan penelitian, dan hasil wawancara. Selain itu sumber primer dapat berupa laporan pandangan mata suatu pertandingan, statistik sensus penduduk dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber data sekunder merupakan tulisan tentang penelitian orang lain, tinjauan, ringkasan, kritikan, dan tulisan-tulisan serupa mengenai hal-hal yang tidak langsung disaksikan atau dialami sendiri oleh penulis. Bahan Literatur sekunder terdapat di ensiklopedi, kamus, buku pegangan, abstrak, indeks, dan textbooks (Ridho Firdaus et al., 2023).

Selanjutnya, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni :

1. Observasi

Observasi atau yang disebut juga dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan metode pengumpulan data yang menggunakan panca indra disertai dengan pencatatan secara perinci terhadap objek penelitian.

2. Wawancara

Menurut pendapat dari Sugiyono (2017:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data yang diperoleh peneliti sesuai dengan pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui gambaran nyata dilapangan dan mendapatkan sumber primer tentang hubungan budaya organisasi sekolah terhadap motivasi kerja guru. Menurut Sugiyono (2017:240) mengatakan bahwa studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model Analisis interaktif Miles & Huberman. Proses analisis dalam penelitian model ini dilakukan dengan empat tahap yaitu; (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, (4) penarikan kesimpulan (Saleh et al., n.d.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berhubungan dengan fokus penelitian, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari beberapa informan. Data mengenai informan penelitian dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel.1

Data Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan
1.	Informan 1	Kepala Sekolah SDN Rongkop
2.	Informan 2	Guru SDN Rongkop
3.	Informan 3	Siswi SDN Rongkop

Pada penelitian ini, informan menyediakan cukup informasi terkait implementasi kebijakan anti-bullying di SDN Rongkop Girisubo.

Profil SDN Rongkop Girisubo

SDN Rongkop Girisubo berlokasi di Desa Jerukwudel, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. SDN Rongkop merupakan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri sejak tahun 1991 dengan Nomor SK Pendirian 125/KPTS/1991 yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah ini memiliki luas tanah yang cukup luas, yaitu 3.888 meter persegi. SDN Rongkop Girisubo memiliki status akreditasi B, yang diraih pada tanggal 10 November 2017 berdasarkan SK No. 10.01/BAP-SM/TU/XI/2017. Akreditasi B ini menunjukkan bahwa SDN Rongkop Girisubo telah memenuhi standar kualitas pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sekolah ini juga didukung oleh akses internet dan sumber listrik PLN, yang penting untuk menunjang proses belajar mengajar yang efektif dan modern.

SDN Rongkop Girisubo merupakan salah satu sekolah dasar negeri di pedesaan yang berperan penting dalam mencerdaskan anak bangsa. Dengan fasilitas yang memadai dan akreditasi yang baik, SDN Rongkop Girisubo dapat menjadi tempat yang nyaman dan efektif bagi siswa untuk belajar dan mengembangkan diri. Dalam kegiatan pembelajaran sekolah yang memiliki 36 siswa ini dibimbing dengan 8 guru yang profesional dalam bidangnya. Kepala

Sekolah SDN Rongkop Girisubo saat ini adalah Nuryanta (*Profil & Data Sekolah SDN RONGKOP GIRISUBO, Kab. Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta, 2024*).

Kebijakan Anti-Bullying di Sekolah

Kebijakan anti-bullying (anti-perundungan) di sekolah merupakan pedoman atau aturan yang ditetapkan oleh sekolah untuk mencegah dan menangani kasus perundungan. Berikut adalah beberapa komponen yang biasanya termasuk dalam kebijakan anti perundungan di sekolah:

1. Definisi perundungan: Kebijakan harus memberikan definisi yang jelas tentang apa itu perundungan dan jenis-jenis perilaku yang termasuk dalam kategori perundungan. Definisi ini harus mencakup tindakan fisik, verbal, dan psikologis yang ditujukan untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi orang lain.
2. Tanggung jawab dan peran: Kebijakan harus menjelaskan tanggung jawab dan peran yang dimiliki oleh semua pihak terkait dalam pencegahan dan penanganan kasus perundungan. Ini termasuk tanggung jawab guru, staf sekolah, peserta didik, orang tua, dan pihak berwenang sekolah.
3. Prosedur pelaporan: Kebijakan harus menyediakan prosedur yang jelas dan mudah diikuti untuk melaporkan kasus perundungan. Hal ini harus mencakup informasi tentang kepada siapa melaporkan, seperti guru, staf, atau petugas keamanan, serta cara melaporkannya, baik secara lisan maupun tertulis.
4. Penanganan kasus perundungan: Kebijakan harus menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk menangani kasus perundungan. Ini termasuk investigasi, pengumpulan bukti, intervensi, sanksi, dan langkah-langkah rehabilitasi yang akan diterapkan terhadap pelaku perundungan.
5. Perlindungan korban: Kebijakan harus menekankan perlindungan dan dukungan yang akan diberikan kepada korban perundungan. Ini dapat mencakup langkah-langkah seperti pendampingan, konseling, atau pengalihan korban ke lingkungan yang lebih aman.
6. Pencegahan dan pendidikan: Kebijakan harus mencakup strategi pencegahan perundungan yang akan diterapkan di sekolah. Ini dapat meliputi program pendidikan, pelatihan keterampilan sosial, kegiatan sosialisasi, atau kampanye kesadaran anti perundungan.
7. Kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat: Kebijakan harus menekankan pentingnya kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus perundungan. Sekolah harus melibatkan orang tua dalam mendukung anak-anak mereka dan membangun kesadaran anti perundungan di masyarakat.
8. Evaluasi dan pemantauan: Kebijakan harus mencakup langkah langkah untuk mengevaluasi dan memantau efektivitas program anti perundungan yang diterapkan di sekolah. Ini dapat melibatkan survei peserta didik, analisis data kasus perundungan, atau pertemuan rutin untuk meninjau kebijakan dan strategi yang ada (Marfita, 2024).

Tinjauan model Implementasi kebijakan berdasarkan teori George Edward III

Pertama aspek **Komunikasi**, komunikasi yang baik akan memastikan pemahaman yang baik dan benar tentang suatu kebijakan dan dengan demikian implementasinya pun akan bisa dilaksanakan dengan baik dan efektif. indikatornya penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula, komunikasi yang diterima oleh para implementor haruslah jelas dan tidak membingungkan, ketidakjelasan akan selalu menghalangi efektivitas implementasi, dan perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (Sutmasa, 2021).

Sasaran kebijakan anti-bullying ini adalah seluruh warga sekolah yang berada di lingkungan sekolah, baik kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Berdasarkan hasil wawancara, SDN Rongkop mempunyai kebijakan anti bullying yang secara resmi telah dikomunikasikan oleh Kepala Sekolah kepada Guru, Siswa, dan Orang tua/wali murid. Kebijakan ini antara lain adalah pembentukan tim Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang ditugaskan untuk mencegah serta menangani kasus bullying dan penyampaian edukasi bullying kepada seluruh siswa dengan berbagai cara.

Kepala sekolah mengkomunikasikan kebijakan ini kepada guru, siswa, dan orang tua dengan melakukan sosialisasi, juga penyampaian secara langsung melalui amanat saat upacara bendera setiap hari senin. Selain itu, guru juga berperan dalam mengkomunikasikan kebijakan ini kepada siswa, hal ini dilakukan dengan cara menyisipkan materi mengenai bullying ketika pembelajaran, juga menegur dan memberikan edukasi secara langsung ketika siswa melakukan kesalahan atau tindak kekerasan. Upaya edukasi ini tentunya sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah terjadinya bullying di sekolah. Dengan komunikasi yang baik dari seluruh warga sekolah, maka pesan-pesan anti-bullying juga akan tertanam dengan baik.

Kedua aspek **Sumberdaya**, agar implementasi kebijakan berjalan sebagaimana mestinya, para pelaksana harus didukung dengan sumber daya yang memadai (Yalia, 2014). Ada beberapa jenis Sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pengimplementasian kebijakan anti-bullying ini, salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang dimaksud dalam konteks implementasi kebijakan anti-bullying ini, adalah seluruh manusia yang terlibat dalam proses pengimplementasian kebijakan anti-bullying di sekolah. Sumber daya lain yang diperlukan dalam pengimplementasian kebijakan adalah Sumber Daya Anggaran, yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan pengimplementasian kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, SDM yang paling utama dalam implementasi kebijakan anti-bullying di SDN Rongkop ini salah satunya adalah Guru. Guru di SDN Rongkop dibekali dengan pelatihan yang ada di platform Platform Merdeka Mengajar (PPM) dengan berbagai materi mengenai pencegahan dan penanganan bullying di sekolah. SDM dari luar juga turut membantu menyumbangkan ilmu mengenai bullying, yakni mahasiswa KKN UAJY 2024 yang melakukan sosialisasi anti-bullying di SDN Rongkop. Namun, Sumber Daya Anggaran diketahui masih belum maksimal. Kepala sekolah mengungkapkan bahwa SDN Rongkop belum mempunyai anggaran untuk membuat program-program anti bullying di sekolah, hal ini dikarenakan sekolah sedang memprioritaskan untuk program lain yang lebih penting, mengingat keterbatasan anggaran/dana di sekolah.

Ketiga aspek **Disposisi**, disposisi merupakan sikap dari pelaksana yang memang harus paralel dan akseptif dengan kebijakan publik itu sendiri. Di sini, disposisi tidak hanya berarti mengetahui apa yang harus dilakukan melainkan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, karena keberhasilan kebijakan sangat bergantung dari seluruh komitmen pemangku kepentingan (Sutmasa, 2021). Kepala sekolah SDN Rongkop menyatakan bahwa kebijakan anti-bullying ini sebagai suatu hal yang sangat penting. Meskipun dalam pengimplementasiannya masih belum konsisten dan maksimal, namun kepala sekolah selalu berkomitmen untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.

Selain Kepala Sekolah, Guru SDN Rongkop juga berkomitmen untuk mendukung program anti-bullying di sekolah, hal ini dilakukan dengan terus mengedukasi siswa mengenai dampak buruk bullying dan selalu berkoordinasi dengan sesama guru dan kepala sekolah. Siswa juga berperan penting dalam hal ini. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu siswa SDN Rongkop, dapat diketahui bahwa siswa tersebut merasa aman dengan lingkungan

sekolahnya. Jika terjadi perundungan, maka siswa akan langsung melaporkannya kepada guru kelas dan saling membantu sesama.

Keempat aspek **Struktur Birokrasi**, struktur birokrasi merupakan otoritas/legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik (Afandi & Warjio, 2015). Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan (Sutmasa, 2021). Berdasarkan hasil penelitian, struktur birokrasi di SDN Rongkop mencakup kolaborasi antara Kepala Sekolah, Guru, Komite dan tim TPPK. Para guru di dorong untuk terus bertukar pendapat dengan guru yang lainnya untuk memantau kemungkinan terjadinya bullying di sekolah. Tim TPPK yang disebutkan di atas beranggotakan guru dan komite, hal ini membuktikan bahwa adanya kolaborasi guru dengan organisasi luar sekolah.

Meskipun sekolah belum menerima arahan langsung dari dinas pendidikan, namun tim TPPK telah berperan penting dalam membangun komitmen sekolah terhadap kebijakan ini.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian “Implementasi Kebijakan Anti-Bullying di SDN Rongkop Girisubo” menunjukkan bahwa implementasi kebijakan anti-bullying ini telah dilaksanakan dengan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), pelatihan bagi guru dan sosialisasi kepada siswa. Meskipun kebijakan tersebut telah diimplementasikan dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran dan sumber daya yang tersedia. Meskipun aspek sumber daya masih terbatas, namun pihak sekolah terus berkomitmen untuk mencegah terjadinya bullying di lingkungan sekolah. Keterlibatan dari pemangku kepentingan lain juga sangat diperlukan untuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan ini.

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan dari hasil penelitian ini, yakni sekolah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung program-program pencegahan bullying lebih lanjut, seperti membuat kegiatan kesadaran mengenai dampak buruk adanya bullying di sekolah, pelatihan lanjut kepada seluruh guru di SDN Rongkop, dan menjalin kolaborasi lebih erat dengan orang tua dan komunitas-komunitas anti-bullying.

REFERENSI

- Alhuda, N. S. (2020). Manajemen Kesiswaan dalam Upaya Meningkatkan Prestasi dan Membentuk Karakter Siswa. *Media Manajemen Pendidikan*, 3(2), 208–219.
- Dafid Ariyanta. (2024). *IMPLEMENTASI PROGRAM ANTI BULLYING DALAM UPAYA MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PECANGAAN KABUPATEN JEPARA*.
- Dr. Abdul Fattah Nasution, M. P. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.
- Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M. A. & L. H. M. S. (2016). *Buku Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak*.
- Fauzan, A., Mabur Haslan, M., FKIP Universitas Mataram, Ppk., & PPKn FKIP Universitas Mataram, D. (2024). *PERILAKU BULLYING DIKALANGAN SISWA (Studi kasus pada siswa di SMP Negeri 14 Mataram)*.

- Gede, :, Bayu, W., Br Bangun, I., Swastika Aryawinata, K., Putu, I., Suputra, E., Meriyani, Y., Kumara, E., Diah, G. A., & Wardani, S. (2024). *EPeLY (Edukasi Peduli Bullying)*. www.freepik.com
- Halim, A., Ilmi, A. A., Dena, M., Panggabean, P., Azizah, N., & Yanda, R. A. (2023). *Implementasi Kebijakan Anti Perundungan (bully) Oleh Konseling Pada Siswa Melalui Layanan Konseling Di SMP Negeri 27 Medan* (Vol. 3, Issue 2).
- Karyanti & Aminudin. (2019). *Cyberbullying & Body Shaming*.
- Maharani, I., Wakhyudin, H., Yusuf,) M, & Wardana, S. (n.d.). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI BULLYING DI SEKOLAH (STUDY KASUS SD N 2 SAMBONGSARI KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL)*. <https://doi.org/10.26877/literasi.v4i2.20496>
- Marfita, R. (2024). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI PERUNDUNGAN UNTUK MENINGKATKAN KENYAMANAN BELAJAR PESERTA DIDIK DI MADRASAH IBTIDAIYAH AT-TAQWA ARCAMANIK, BANDUNG*. UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA.
- Misfala, M. Y., Umar, Z., Hamdan, M. Z., Maskurii, A. H., & Nizam, M. F. N. (2023). Faktor-Faktor Penyebab Bullying Peserta Didik di Era Milenial. *Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration*, 1(02), 39–53.
- Muhammad Hasbi, I. S. L. R. M. E. A. B. W. A. A. M. A. S., Jenderal, D., Anak, P., Dini, U., Dasar, P., & Direktorat, M. (2020). *PENCEGAHAN PERUNDUNGAN Pada Anak Usia Dini*.
- Nasution, U. A. (2024). PERAN GURU DALAM MENCEGAH PERILAKU BULLYING. *Analysis*, 2(1), 187–194.
- Profil & Data Sekolah SDN RONGKOP GIRISUBO, Kab. Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta.* (2024). <https://Daftarsekolah.Net/Sekolah/77862/Sdn-Rongkop-Girisubo>.
- Ratih. (2024, June). *Perundungan Adalah: Pengertian, Unsur-Unsur, Jenis, Contoh, Dampak, Dan Cara Mencegahnya*. Gramedia.Com.
- Rena, S., Marfita, R., & Padilah, S. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI-BULLYING DI SEKOLAH (STUDI KASUS MTS MADINATUNNAJAH CIPUTAT). In *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* (Vol. 5, Issue 1).
- Ridho Firdaus, D., Zohriah, A., Fauzi, A., Sultan Maulana Hasanuddin Banten, U., Jendral Sudirman No, J., Cipocok Jaya, P., Serang, K., & Serang, K. (2023). Analisis Model Kepemimpinan Kharismatik dan Visioner di Pondok Pesantren. *Journal on Education*, 05(04).
- Rohimin Saman Huda Nur, Pahlevi, M. S., & Andyan, A. (2024). Implementasi Program Anti Bullying Di Lingkungan Sekolah SMK Muhamamdadiyah 6 Gemolong. *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 148–156. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i1.2125>
- Saleh, S., Pd, S., & Pd, M. (n.d.). *ANALISIS DATA KUALITATIF Editor: Hamzah Upu*.
- Sinaga, D. (n.d.). *BUKU AJAR METODOLOGI PENELITIAN*.
- Subarsono, DRS. AG. (n.d.). *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK: KOONSEP, TEORI DAN APLIKASI*.
- Sutmasa, Y. G. (2021). *MEMASTIKAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK*. 04(01), 25–36.

Syahroni, I. H. (2024). Perancangan Buku Ilustrasi “Tips Mendampingi Anak Usia Sekolah Dasar Belajar Di Rumah” Untuk Orang Tua: Tips Mendampingi Anak Usia Sekolah Dasar Belajar Di Rumah. *Jurnal Kemadha*, 14(1), 1–9.

Tesi Muskania, R. (2018). *STRATEGI THINK PAIR SHARE UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR PADA MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM*. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrpd>

Widyaningtyas, R., & Rochman Hadi Mustofa. (2023). Implementasi Kebijakan Anti-Bullying Sekolah Adipangastuti di SMAN 1 Surakarta. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(01), 533–548. <https://doi.org/10.31316/gcouns.v8i01.5489>

Wulansari, L., Vernia, D. M., Nurisman, H., Hermanto, H., Widiarto, T., Sutina, S., & Widiyarto, S. (2023). Penyuluhan Pencegahan Perundungan (Bullying) di SMP Kota Bekasi Jawa Barat. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(5), 638–643.

Yalia, M. (2014). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL MEDIA TRADISIONAL DI JAWA BARAT*.

Yuliah, E. (2020). Implementasi kebijakan pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129–153.